



EKONOMI

Bagaimana Kerja Jarak Jauh Mengubah Pencarian Kerja Modern

Oleh Redaksi · 3 Okt, 21.23 WIB



Seorang wanita profesional muda yang sedang bekerja di depan laptop di sebuah ruangan modern dengan pemandangan kota yang luas. Suasana foto terasa hangat, tenang, dan produktif. FOTO/Al for HAI.

BANDA ACEH - Cara orang mencari pekerjaan telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Belum lama ini, menemukan pekerjaan baru biasanya berarti memeriksa papan lowongan lokal, mengunjungi situs web perusahaan, berbicara dengan kenalan di daerah Anda, dan berharap ada peluang yang cocok di sekitar tempat tinggal.

Hari ini, situasinya terlihat sangat berbeda. Kerja jarak jauh (remote work) telah membuka pintu bagi peluang yang mungkin berjarak ratusan atau bahkan ribuan kilometer.

Bagi para pencari kerja, perubahan ini membawa lebih banyak pilihan, namun juga meningkatkan persaingan.

Ketika lokasi bukan lagi syarat utama, perusahaan dapat menerima lamaran dari orang-orang di berbagai kota, negara, dan zona waktu. Lalu, bagaimana cara Anda agar bisa menonjol?

Memahami metode modern dalam mencari pekerjaan dapat membuat prosesnya jauh lebih mudah.

Salah satu perubahan paling signifikan yang dibawa oleh kerja jarak jauh adalah kebebasan dari batasan geografis. Seseorang yang tinggal di kota kecil kini dapat melamar pekerjaan di perusahaan yang berbasis di kota besar tanpa harus pindah tempat tinggal.

[Selengkapnya di halaman 14 »](#)

NASIONAL

Gibran Dilaporkan ke Bareskrim Atas Dugaan Pemalsuan Dokumen Penyetaraan Ijazah



BANDA ACEH - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait polemik keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan saat proses pencalonannya pada Pemilu 2024.

Laporan tersebut diajukan oleh Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dan organisasi Jawara Bela Umat Bela Rakyat (Pejabat) ke SPKT Bareskrim Polri pada Sabtu ...

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

NASIONAL

Kejagung Ungkap Adanya Dugaan Manipulasi Pengadaan Motor MBG Rp1,22 T, Anggota TNI Ikut Maen Proyek



BANDA ACEH - Kejaksaaan Agung membongkar dugaan adanya manipulasi masif dalam pengadaan motor listrik program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Modus ini diduga kuat merupakan rekayasa sistematis yang melibatkan Pejabat Penandatanganan Komitmen (PPK) dan sejumlah pihak swasta.

[Selengkapnya di halaman 3 »](#)

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
OPINI	12
Aneka Berita	14

OPINI

Ketika MK Diuji oleh Syarat Pendidikan Gibran



Oleh: Kenny Wiston((Penulis adalah Advokat))

DA perkara yang selesai ketika hakim membacakan putusan.

Ada pula perkara yang jauh lebih panjang umurnya: perkara yang setelah putusan dibacakan

justru meninggalkan pertanyaan bagi sejarah.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi berpotensi menjadi perkara jenis kedua.

[Selengkapnya di halaman 12 »](#)

NASIONAL

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto telah melantik 26 orang sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jumat, 2 Oktober 2026.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitasi

tas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, masing-masing Ketua dan Anggota Wantimpres mendapat ...

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

NASIONAL

Akbar Faizal Bongkar Agenda Jahat Wapres Gibran



BANDA ACEH - Kritik tajam kembali diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Politikus senior sekaligus Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, mempertanyakan sikap Gibran terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), khususnya mengenai potensi risiko serius teknologi tersebut.

[Selengkapnya di halaman 5 »](#)

NASIONAL

Politisi PSI: Kalau Gibran Digantikan, Prabowo Diganti Juga Dong



BANDA ACEH - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah bergulirnya gugatan terkait syarat pendidikan pencalonannya pada Pilpres 2024.

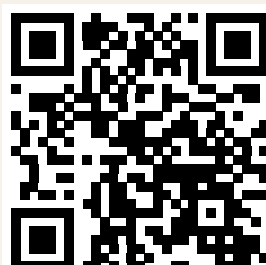
Polemik tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai konsekuensi hukum jika status Gibran sebagai wapres dipersoalkan hingga berujung pada pergantian.

[Selengkapnya di halaman 4 »](#)

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

22 BERITA

NASIONAL

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Oleh Redaksi · 3 Okt, 19.38 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto telah melantik 26 orang sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jumat, 2 Oktober 2026.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, masing-masing Ketua dan Anggota Wantimpres mendapat hak keuangan sebesar Rp76,5 juta per bulan.

Jika dihitung berdasarkan besaran tersebut, hak keuangan 26 anggota Wantimpres mencapai Rp1,989 miliar per bulan.

Ketentuan tersebut mulai berlaku sejak Perpres Nomor 15 Tahun 2026 ditetapkan pada 27 Maret 2026.

Selain menerima hak keuangan bulanan, Ketua dan Anggota Wantimpres juga memperoleh fasilitas lainnya yang diberikan sesuai dengan fasilitas menteri.

Hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua dan Anggota Wantimpres tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembayaran hak keuangan dihentikan apabila pejabat yang

bersangkutan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.

Pajak penghasilan atas hak keuangan tersebut juga tetap dikenakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Lantas, apa tugas yang dijalankan 26 orang tersebut hingga mendapat hak keuangan puluhan juta rupiah setiap bulan?

Ketua Wantimpres Pratikno menegaskan tugas lembaga yang dipimpinnya adalah memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, yaitu Bapak Presiden. Tugas kami adalah memberikan masukan, pertimbangan kepada Bapak Presiden," kata Pratikno di Istana Negara, Jakarta.

Pratikno mengatakan, anggota Wantimpres periode baru merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, agama, dan profesi.

Menurutnya, pengalaman para anggota menjadi modal untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden.

"Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk berbagi pengalaman, menyampaikan per-

timbangan kepada Bapak Presiden," ujarnya.

Ia meyakini keberagaman pengetahuan dan pengalaman para anggota Wantimpres dapat memperkaya saran yang diberikan kepada Kepala Negara.

"Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang," tutur Pratikno.

Berikut daftar lengkap 26 anggota Anggota Wantimpres:

- Pratikno (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2024-2026, Menteri Sekretaris Negara 2014-2024)
- Hatta Rajasa (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2019-2024)
- Muhammad Qodari (Kepala Badan Komunikasi Pemerintah 2026)
- Shinta Nuriyah Wahid (Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid)
- Muhammad Quraish Shihab (Menteri Agama 1998)
- Agum Gumelar (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2018-2019, Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan 2001)
- Budi Gunawan (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2024-2025, Kepala Badan Intelijen Negara 2016-2024)
- Chairul Tanjung (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2024)
- Salim Segaf Aljufri (Menteri Sosial 2009-2014, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera 2015-2025)
- KH Anwar Iskandar (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 2023-sekarang)
- KH Said Aqil Siradj (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2010-2021)
- KH Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2021-2026)
- Philip Kuncoro Wijaya (Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia)
- Budi Tanuwibowo (Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia)

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Gibran Dilaporkan ke Bareskrim Atas Dugaan Pemalsuan Dokumen Penyetaraan Ijazah

Oleh Redaksi · 3 Okt, 19.14 WIB



BANDA ACEH - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait polemik keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan saat proses pencalonannya pada Pemilu 2024.

Laporan tersebut diajukan oleh Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dan organisasi Jawara Bela Umat Bela Rakyat (Pejabat) ke SPKT Bareskrim Polri pada Sabtu siang (3/10/2026).

Pelapor menduga terdapat keterangan yang tidak benar dalam surat keterangan pendidikan yang digunakan Gibran.

Selain Gibran, pihak yang menerbitkan surat tersebut juga dilaporkan untuk dimintai pertanggungjawaban sesuai hasil penyelidikan polisi.

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, mengatakan laporan tersebut berfokus pada dugaan ketidakbenaran isi surat keterangan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Ada dua objek dalam surat ini yang ingin kami ingin laporkan pertama, dugaan mengeluarkan surat palsu, menerbitkan surat palsu atau surat yang di dalamnya keterangan yang tidak benar. Apa palsu atau keterangan tidak benar? Yakni yang menyatakan grade 12 UTS ini yang setara dengan SMK peminatan akuntansi dan kejuruan," ujar Khozinudin dalam konferensi pers, Sabtu (3/10).

Khozinudin menegaskan bahwa pihaknya menduga penyetaraan surat keterangan tersebut bermasalah.

"Ada dugaan dokumennya ini isinya palsu, atau keterangan dalam dokumen ini tidak benar," ungkapnya.

Ia menjelaskan, pihak yang menerbitkan dokumen juga dilaporkan karena diduga membuat keterangan yang tidak benar, sedangkan pihak yang menggunakan dokumen tersebut juga dilaporkan untuk diperiksa lebih lanjut.

"Pertama yang menerbitkannya, kami duga melanggar Pasal 391

ayat 1, yang menggunakannya Pasal 391 ayat 2," ujarnya.

Ahmad menegaskan, pihaknya menyerahkan kepada penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut.

"Di sinilah nanti kewenangan penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah benar ditemukan tindak pidana dalam penerbitan surat termasuk isinya," kata Ahmad.

Persoalkan Keterangan Grade 12 UTS

Salah satu hal yang diminta pelapor untuk didalami polisi adalah keterangan mengenai grade 12 UTS yang disebut disetarakan dengan tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) peminatan Akuntansi dan Keuangan.

Ahmad mengatakan pihaknya ingin mengetahui apakah benar Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS sebagaimana tertulis dalam dokumen tersebut.

"Fokusnya kita adalah pada ada tidaknya pemalsuan isinya, bukan surat palsu ya, tapi isinya palsu," ujar Khozinudin.

Ia memberikan contoh untuk menjelaskan maksud dugaan keterangan yang tidak benar tersebut.

"Misalkan seorang dikatakan punya dua anak laki-laki, tapi ternyata anaknya hanya tiga perempuan semua, itu kan berarti isi keterangannya palsu," katanya.

Menurut Ahmad, keterangan mengenai penyelesaian pendidikan grade 12 di UTS perlu diperiksa oleh penyidik untuk mengetahui kebenarannya.

Selain itu, pelapor juga meminta polisi mendalami keterangan bahwa grade 12 UTS tersebut dianggap setara dengan tamat SMK peminatan Akuntansi dan Keuangan.

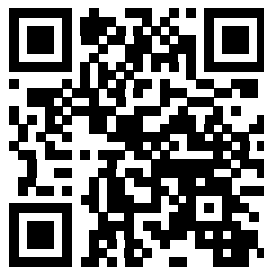
"Yang kedua, grade 12 UTS itu dianggap setara tamat sekolah menengah kejuruan, SMK, peminatan Akuntansi dan Keuangan, ini juga harus diperiksa," kata Khozinudin.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

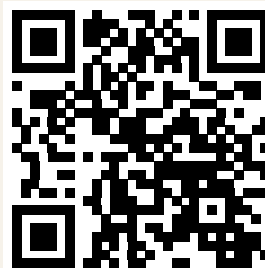
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Kejagung Ungkap Adanya Dugaan Manipulasi Pengadaan Motor MBG Rp1,22 T, Anggota TNI Ikut Maen Proyek

Oleh Redaksi · 3 Okt, 19.52 WIB



BANDA ACEH - Kejaksaan Agung membongkar dugaan adanya manipulasi masif dalam pengadaan motor listrik program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Modus ini diduga kuat merupakan rekayasa sistematis yang melibatkan Pejabat Penandatanganan Komitmen (PPK) dan sejumlah pihak swasta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Supriatna mengungkap adanya perbedaan mencolok dari target 25.694 unit, realisasi riil hingga Maret 2026 hanya 2.117 unit.

“Yang kurang lebih kalau dijanjikan itu kan sekitar 25.694. Ternyata dalam pelaksanaan direvisi. Dan di akhir sekitar Maret 2026 realisasi cuma 2.117 unit,” ujar Anang di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (2/10).

Anang mengatakan adanya 5 tersangka yang diduga terlibat

dalam mengondisikan proses pengadaan, mulai dari pemenang, spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri (HPS), hingga perusahaan pembanding untuk memenangkan PT YAT.

“Dalam perkara tersebut, Penyidik Koneksitas telah menetapkan 5 orang Tersangka, dengan 4 di antaranya berasal dari pihak swasta, yaitu: Tersangka AM selaku Komisaris PT ASE sekaligus Komisaris PT Yasa Artha Tri-manunggal, Tersangka YY selaku Direktur PT YAT, Tersangka AA selaku Direktur PT ASE, Tersangka GB selaku Direktur PT ASE, dan Tersangka Kolonel Cpl BU selaku Pejabat Penandatanganan Komitmen (PPK),” katanya.

Para tersangka kini telah ditahan di berbagai lokasi. BU ditahan di Rutan Instalasi Tahanan Militer Pomdam Jaya, AM di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, YY di Rutan Kelas I Pondok Bambu,

sedangkan AA dan GB ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

“Tersangka Kolonel Cpl BU dilakukan penahanan di Rutan Instalasi Tahanan Militer Pomdam Jaya, Tersangka AM di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Tersangka YY di Rutan Kelas I Pondok Bambu, Tersangka AA dan Tersangka GB di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” katanya.

Untuk mengungkap kasus ini, Anang mengatakan telah melakukan penyitaan berupa 5 unit handphone, 89 dokumen, dan uang senilai Rp24,97 miliar.

“Dari penelusuran aset, penyidik telah melakukan penyitaan, ada kurang lebih 5 unit handphone, terus 89 dokumen dan uang yang setelah disita Rp24,97 miliar,” ujar Anang.

Penyitaan pada aset lain yang diamankan meliputi satu pesawat

Textron Aviation, satu helikopter BL505, satu unit kendaraan Hino, dua unit kendaraan BYD, satu unit BYD Dolphin, dan satu unit Lexus LM500 tahun 2025.

“Telah dilakukan penyitaan pada 1 unit pesawat Textron Aviation, 1 unit helikopter BL505, 1 unit kendaraan Hino, 2 unit kendaraan BYD, 1 unit kendaraan BYD Dolphin, dan 1 unit Lexus LM500 tahun 2025,” ujarnya.

Anang menyatakan akan terus mendalami keterlibatan dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, termasuk peran korporasi dalam perkara ini.

“Tim Penyidik selanjutnya terus mendalami keterlibatan dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, termasuk peran korporasi dalam perkara tersebut, serta melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana,” katanya.

NASIONAL

Feri Amsari Unggah Video Lama Rocky Gerung yang Nyatakan Akan Tolak Jabatan

Oleh Redaksi · 3 Okt, 19.55 WIB



BANDA ACEH - Pelantikan Rocky Gerung sebagai salah seorang dewan pertimbangan presiden (wantimpres) Prabowo Subianto mendapat sorotan dari banyak pihak. Termasuk oleh aktivis yang selama ini kerap mengkritisi pemerintah seperti Feri Amsari.

Dilihat dari unggahan pada akun media sosial resminya, Feri Amsari mengunggah video lama yang menunjukkan percakapan dirinya dengan Rocky. Dalam unggahan dengan caption kalau sewaktu-waktu itu, Feri sempat bertanya kepada Rocky Gerung.

“Kalau tiba-tiba memang panggilan untuk mengabdikan itu datang,” ucap Feri dalam video tersebut.

“Saya bilang kalau tawaran itu datang, saya akan dengan cara sek-sama dalam tempo sesingkat-singkatnya menolak,” jawab Rocky.

Tidak hanya Feri, beberapa akun media sosial lain juga mengunggah konten serupa. Mereka menyindir Rocky yang kerap melempar kritik kepada pemerintah namun pada akhirnya ikut bergabung dengan pemerintah sebagai salah seorang wantimpres.

Resmi Jadi Wantimpres Presiden Prabowo

Sebelumnya diberitakan bahwa Rocky Gerung resmi masuk dalam jajaran pemerintahan sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jumat (2/10), usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta.

Masuknya Rocky langsung menjadi sorotan publik, mengingat dia selama ini dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, bahkan terkesan berseberangan.

Usai dilantik, Rocky menegaskan bahwa keberadaannya di lembaga tersebut tidak semata-mata untuk mengkritik Presiden Prabowo.

Dia menyebut anggota Wantimpres memiliki tugas memberikan kritik, saran, sekaligus menyam-

paikan beragam persepsi yang berkembang terkait kebijakan pemerintah.

Menurut Rocky, Wantimpres mempunyai posisi etis dalam melihat kebijakan pemerintah secara lebih luas. Lembaga tersebut juga memiliki fungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai arah kebijakan yang akan ditempuh.

“Pesannya khusus diberikan Pak Pres bahwa dewan pertimbangan punya kedudukan etis, kemampuan untuk melihat kebijakan dan memberikan pertimbangan soal arah, adalah fungsi normatif dari dewan,” kata Rocky.

Wantimpres Harus Bisa Kontemplasi dan Evaluasi

Rocky mengatakan, anggota Wantimpres perlu memiliki kemampuan untuk melakukan kontemplasi dan evaluasi terhadap berbagai persoalan. Kemampuan tersebut dinilai penting agar dewan tidak hanya melihat persoalan yang sedang terjadi, tetapi juga mampu membayangkan arah masa depan Indonesia.

Karena itu, Rocky menilai tugas Wantimpres tidak berhenti pada memberikan pandangan terhadap kebijakan yang sudah berjalan.

Anggota Wantimpres juga dituntut membaca perkembangan situasi dan memberikan masukan terkait arah kebijakan pemerintah.

Rocky turut menekankan pentingnya memahami persepsi masyarakat terhadap kekuasaan dan kebijakan pemerintah.

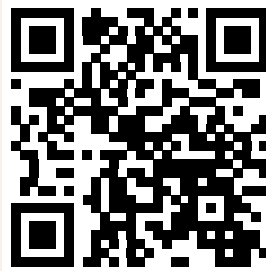
Menurut dia, persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik membutuhkan keahlian masing-masing anggota untuk mengolah berbagai persepsi yang muncul di tengah masyarakat.

“Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, dan paling penting menunjukkan apa yang salah dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana diolah menjadi positif untuk negeri,” ujarnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Setubuhi Santriwati di Hotel, Pimpinan Ponpes di Lombok Kabur ke Mekkah

Oleh Redaksi · 3 Okt, 16.03 WIB



BANDA ACEH - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram menyoroti penanganan dua kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum pimpinan pondok pesantren (ponpes).

LPA menyebut, proses hukum kedua kasus tersebut hingga kini mengalami hambatan.

Ketua LPA Kota Mataram Joko Jumadi mengungkapkan, salah satu kasus terjadi di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah.

Kasus tersebut diduga melibatkan pimpinan Yayasan Nurabakti, Ponpes Walyatalatof, berinisial atau bernama Tuan Guru Darmawadi Abdul Hamid.

Menurut Joko, terduga pelaku diduga membawa seorang santriwati keluar dari lingkungan pondok. Korban kemudian disebut dibawa ke sebuah hotel dan diduga mengalami kekerasan seksual.

"Kasus yang di Desa Mujur ini, terduga pelaku membawa santriwatinya keluar, kemudian dibawa

check in hotel dan disetubuhi di dalam hotel," ungkap Joko.

Joko menyebut, pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut kini berada di luar negeri. Bahkan, menurut informasi yang diterima LPA, yang bersangkutan disebut telah berada di Mekkah.

LPA mengaku masih berupaya menelusuri keberadaan dan dokumentasi terkait terduga pelaku untuk kepentingan penanganan kasus. "Kami lagi cari fotonya. Nanti saya share ke teman-teman media, Supaya bisa disebarluaskan dan mudah pencarian terduga pelaku," katanya.

Sementara kasus kedua terjadi di Kabupaten Sumbawa. Anggota LPA Kota Mataram Yan Mangandar mengatakan, kasus tersebut memiliki jumlah korban yang cukup banyak.

"Untuk kasus di Sumbawa, korbananya 29 santri. Yang sudah di-BAP sebanyak 27 santri," katanya.

Menurut Yan, oknum pimpinan ponpes yang diduga terlibat dalam perkara tersebut sebelumnya telah

ditahan oleh penyidik Polres Sumbawa. Namun, masa penahanan yang hampir berakhir membuat yang bersangkutan kemudian mendapatkan penangguhan penahanan.

"Dia sudah menjalani penahanan hampir 120 hari. Kemudian ditangguhkan sekitar lima hari sebelum masa penahanan berakhir," jelasnya.

Yan mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi sorotan LPA adalah proses pemberkasan perkara. Berkas perkara disebut telah beberapa kali dikirim penyidik kepada jaksa, namun kembali dengan petunjuk atau P-19.

LPA menilai sejumlah petunjuk tersebut perlu dipertanyakan, khususnya berkaitan dengan keterangan para saksi korban.

"Petunjuk jaksa menurut kami sangat tidak masuk akal. Bahkan ada kesan kasus ini memang sengaja tidak mau dinaikkan," tegasnya.

Padahal, lanjut Yan, dari sisi pembuktian terdapat 27 saksi yang telah diperiksa. Bahkan, beberapa

saksi disebut saling mengetahui atau menyaksikan dugaan perbuatan kekerasan seksual yang terjadi.

"Kalau melihat dari sisi pembuktian, jumlah saksi ada 27. Beberapa saksi itu saling menyaksikan terkait perbuatan dugaan pencabulan atau kekerasan seksualnya," katanya.

LPA juga menyoroti adanya keraguan terhadap keterangan saksi anak. Menurut Yan, terdapat saksi yang usianya masih di bawah 15 tahun sehingga keterangannya tidak diambil di bawah sumpah.

Namun, menurut dia, kondisi tersebut semestinya tidak serta merta menghilangkan nilai pembuktian dari keterangan anak, terlebih perkara tersebut berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual terhadap anak.

"Seharusnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak, keterangannya tetap dapat diterima," ujarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Politisi PSI: Kalau Gibran Digantikan, Prabowo Diganti Juga Dong

Oleh Redaksi · 3 Okt, 19.53 WIB



BANDA ACEH - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah bergulirnya gugatan terkait syarat pendidikan pencalonannya pada Pilpres 2024.

Polemik tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai konsekuensi hukum jika status Gibran sebagai wapres dipersoalkan hingga berujung pada pergantian.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menilai posisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan satu kesatuan sejak keduanya didaftarkan sebagai pasangan calon dalam Pilpres 2024. Karena itu, ia mempertanyakan konsekuensi apabila hanya status Gibran yang dinyatakan bermasalah.

"Kalau Gibran digantikan, Prabowo diganti juga dong. Jadi saat mendaftar itu kan tidak boleh mendaftar satu-satu kan, makanya kenapa kemudian yang harus mendaftar di mahkamah konstitusi itu adalah pasangan calon," ujar Ahmad Ali dalam keterangannya, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Ahmad Ali kemudian menjelaskan pandangannya dengan mengaitkan mekanisme sengketa hasil pemilu dengan status pasangan calon.

Menurutnya, pencalonan dalam Pilpres dilakukan secara berpasangan sehingga persoalan terhadap salah satu pihak perlu dilihat dalam konteks pasangan calon.

adalah pasangan calon karena berpasangan, kalau satu tidak memenuhi syarat terus yang satu memenuhi syarat dibiarkan jalan terus, nah menurut kata KPU mereka

sudah verifikasi. Kemudian Bawaslu (bilang) tidak ada pengaduan masyarakat," ungkapnya.

Ia juga menyinggung kemungkinan konsekuensi terhadap posisi Prabowo sebagai pasangan Gibran apabila status Gibran benar-benar dipersoalkan hingga berujung pergantian.

"Sekali lagi bahwa ini adalah tetiak terlepas dari upaya kebencian, adat desain Politik. Padahal kalau menunggu saja 3 tahun setengah lah, maju kan kandidat untuk berkontestasi," kata Ahmad Ali.

Lebih lanjut, Ahmad Ali menyinggung sosok Prof Denny Indrayana yang menjadi salah satu penggugat perkara tersebut. Ia menyampaikan komentarnya terkait perjalanan Denny sebelum mengajukan gugatan.

"Denny nda tahu mungkin dikejar dari Indonesia kemudian lari ke Australia, kemudian dia pulang lagi dari Australia langsung tiba-tiba buat, sayembara dan tiba-tiba bikin gugatan," sebutnya.

Wacana mengenai pemakzulan Gibran sendiri mencuat seiring gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memersoalkan syarat pendidikan pencalonannya.

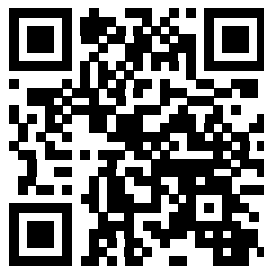
Para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan saat mencalonkan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Maka dari itu, pemohon meminta MK mendiskualifikasi hingga membatalkan pelantikan Gibran.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

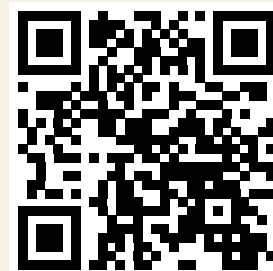
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Akbar Faizal Bongkar Agenda Jahat Wapres Gibran

Oleh Redaksi · 3 Okt, 12.39 WIB



BANDA ACEH - Kritik tajam kembali diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Politikus senior sekaligus Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, mempertanyakan sikap Gibran terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), khususnya mengenai potensi risiko serius teknologi tersebut.

Akbar menilai Gibran selama ini kerap menyebut AI dalam berbagai pernyataannya. Namun, menurut dia, pembahasan mengenai sisi berbahaya dan risiko teknologi tersebut justru belum mendapat perhatian yang memadai.

Pernyataan itu disampaikan Akbar melalui akun X pribadinya pada Jumat, 2 Oktober 2026. Kritik tersebut kemudian diberitakan sejumlah media nasional pada hari yang sama.

“Saudara Wapres @gibran_tweet, saya ingin Anda bersikap tentang risiko mematikan teknologi AI,” tulis Akbar.

Ia mempertanyakan posisi Gibran yang menurutnya kerap tampil sebagai pihak yang

mengampanyekan AI, tetapi tidak kembali diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Politikus senior sekaligus Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, mempertanyakan sikap Gibran terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), khususnya mengenai potensi risiko serius teknologi tersebut.

“Sbg juru kampanye AI —meski hanya sekadar nyebut kalimat ‘...AI’ pada banyak pernyataan Anda tanpa sekalipun menjelaskan apa dan bagaimana AI itu,” lanjut Akbar.

Menurut Akbar, publik membutuhkan penjelasan yang lebih substansial mengenai perkembangan AI, termasuk potensi ancaman yang dapat muncul apabila teknologi tersebut berkembang tanpa pengawasan dan pemahaman yang memadai.

Akbar kemudian mengaitkan kritiknya terhadap AI dengan aktivitas Gibran dalam menangani persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan yang dialami penerima manfaat.

Ia mempertanyakan mengapa Gibran lebih sering turun langsung mengunjungi anak-anak yang terdampak persoalan MBG diban-

dingkan memberikan perhatian terhadap risiko teknologi AI.

“Kami butuh penjelasan tentang risiko itu ketimbang rutin kunjungi anak yang keracunan makanan MBG. Biarkan itu dikerjakan staf MBG,” kata Akbar.

Akbar bahkan menduga aktivitas kunjungan tersebut berkaitan dengan upaya membangun citra Politik Gibran.

“Anda tampaknya ingin menuai respek elektoral dari keruwetan program pemerintahan Anda ini ketimbang ikut bertanggungjawab,” ujarnya.

Ia kemudian melontarkan pernyataan paling keras dalam kritiknya.

“Itu agenda jahat lho. Sesekali jadilah berguna,” tegas Akbar.

Di sisi lain, catatan pemberitaan menunjukkan Gibran memang beberapa kali turun langsung menemui siswa yang mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG.

Pada 28 September 2026, misalnya, Wakil Presiden melakukan kunjungan ke Batang dan meminta

agar investigasi mengenai dugaan keracunan makanan segera dituntaskan serta hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik.

Dalam keterangan resmi Sekretariat Wakil Presiden, Gibran juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, terutama menyangkut keamanan pangan, higiene, pengolahan, penyimpanan, distribusi, serta pengawasan di lapangan.

Dengan demikian, tuduhan Akbar bahwa kunjungan Gibran semata-mata bertujuan memperoleh “respek elektoral” merupakan penilaian dan dugaan politik dari Akbar, bukan fakta yang telah dibuktikan secara independen.

Menariknya, perkembangan terbaru juga menunjukkan teknologi AI justru mulai digunakan dalam pengawasan program MBG.

Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Oktober 2026 menyatakan akan mengintegrasikan kamera CCTV di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sistem AI di kantor pusat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Selain Ijazah, Silsilah Keluarga Gibran Ikut Dicurigai

Oleh Redaksi · 3 Okt, 20.06 WIB



Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Foto Keluarga (kanan). FOTO/Kolase.

BANDA ACEH - Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini merembet ke persoalan data keluarga.

Aktivis senior Beathor Suryadi ikut mempertanyakan sejumlah informasi dalam dokumen administrasi Gibran, termasuk nama ibu kandung yang disebutkan tidak terlihat jelas dalam dokumen penyetaraan pendidikan.

Persoalan tersebut sebelumnya memang menjadi sorotan dalam gugatan Mercy Sihombing ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mercy mempersoalkan data penyetaraan pendidikan Gibran yang disebut hanya menampilkan nama ayahnya, Joko Widodo, sementara nama ibu kandung ditutup atau disensor.

Beathor kemudian mengaitkan persoalan administratif tersebut dengan pertanyaan yang lebih luas mengenai silsilah keluarga Gibran.

Menurut dia, informasi yang ditutup dalam dokumen publik justru dapat memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Ia menilai pencoretan atau penutupan informasi mengenai nama ibu kandung tidak semestinya dianggap sekadar persoalan teknis administrasi.

Menurut Beathor, kondisi itu justru membuka ruang spekulasi mengenai transparansi data kependudukan pejabat negara.

“Pertanyaan mengenai asal-usul dan silsilah ini muncul karena banyaknya kejanggalan dalam berkas administrasi. Ketika nama ibu kandung dicoret atau ditutup dalam dokumen resmi seperti penyetaraan ijazah di PTUN,

publik tentu berhak bertanya-tanya ada apa di balik penutupan informasi tersebut,” kata Beathor dalam tayangan YouTube SindoNews, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Beathor juga menceritakan temuan foto masa lalu yang menurutnya memperlihatkan sosok Joko Widodo berkumis dan beracamata berdampingan dengan sosok Widodo lainnya yang tidak berkumis.

Ia menyebut temuan tersebut menjadi bagian dari pertanyaan yang menurutnya perlu dijelaskan mengenai rekam jejak keluarga dan masa lalu Jokowi.

Di tengah polemik tersebut, Beathor juga mengaitkan persoalan dokumen Gibran dengan perdebatan lama mengenai keabsahan ijazah Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Namun, tuduhan mengenai dugaan rekayasa dokumen tersebut merupakan klaim Beathor yang masih menjadi bagian dari polemik publik.

Ia menyebut penelusuran terhadap berbagai dokumen dan informasi perlu dilakukan secara terbuka agar seluruh persoalan dapat diuji melalui mekanisme hukum.

Menurutnya, persoalan administrasi pejabat negara semestinya tidak menisakan pertanyaan yang berlarut-larut.

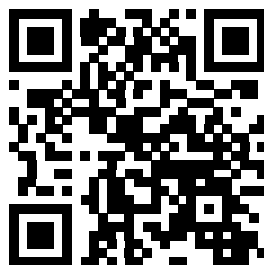
Beathor pun meminta persoalan tersebut tidak berhenti sebagai perdebatan di ruang publik.

Ia mendorong adanya pembuktian melalui proses hukum agar masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai dokumen dan informasi yang dipersoalkan.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Reshuffle Kabinet ke-7, Damai Hari Lubis: Makin Kuatnya Jokowi di Pemerintahan Prabowo

Oleh Redaksi · 3 Okt, 12.36 WIB



BANDA ACEH - Pergantian sejumlah pejabat tinggi negara dalam reshuffle ketujuh Kabinet Merah Putih memunculkan analisis Politik mengenai posisi Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Masuknya sejumlah nama yang memiliki rekam jejak di pemerintahan sebelumnya, termasuk Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), dinilai menjadi bagian penting dalam membaca konfigurasi kekuasaan politik nasional.

Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik (KUHP), Damai Hari Lubis, menilai perkembangan politik tersebut memperlihatkan bahwa mantan Presiden Jokowi masih memiliki modal politik yang signifikan, meskipun telah mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024.

Menurut Damai, perombakan kabinet yang dilakukan Prabowo pada Kamis (1/10/2026) di Istana Kepresidenan tidak bisa hanya dibaca sebagai pergantian personel pemerintahan.

Perubahan tersebut, menurut dia, juga menarik untuk dicermati dari perspektif hubungan kekuasaan, kesinambungan politik, dan pengaruh para tokoh yang pernah berada di lingkaran pemerintahan sebelumnya.

"Posisi Presiden RI ke-7 Jokowi semakin kuat," demikian pandangan Damai Hari Lubis dalam membaca dinamika politik pasca-reshuffle kabinet, Jumat (2/10/2026).

Salah satu perubahan yang menjadi sorotan adalah pergeseran Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Posisi Kapolri kemudian dipercayakan kepada Komjen Pol Suyudi Ario Seto.

Di sisi lain, Dudung Abdurachman yang sebelumnya menjabat KSP dilantik menjadi Menko Polkam menggantikan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.

Bagi Damai, penempatan Dudung pada jabatan strategis tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat analisis mengenai konfigurasi politik di lingkungan pemerintahan Prabowo.

Dudung merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang memiliki pengalaman panjang dalam institusi militer.

Penunjukannya sebagai Menko Polkam menempatkan dirinya pada posisi strategis dalam koordinasi urusan politik dan keamanan nasional.

Damai menilai, masuknya Dudung ke jajaran menteri koordinator, bersamaan dengan pergeseran sejumlah pejabat lainnya, memperlihatkan dinamika politik yang patut diperhitungkan oleh berbagai kelompok yang selama ini memiliki pandangan berbeda terhadap figur-figur tertentu.

Perhatian Damai juga tertuju pada keputusan Prabowo menempatkan Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan setelah tidak lagi menjabat Kapolri.

Menurut dia, pergeseran tersebut menjadi bagian penting dalam membaca kesinambungan posisi pejabat tinggi negara di lingkungan pemerintahan.

Dengan jabatan baru itu, Listyo tetap berada di lingkungan strategis Istana Kepresidenan.

Perubahan jabatan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pergantian pimpinan institusi kepolisian tidak serta-merta mengakhiri keterlibatan Listyo dalam struktur pemerintahan.

Selain Listyo, Damai turut menyoroti keberadaan Pratikno yang disebutkan menempati posisi di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), serta penunjukan Mohammad Fadhil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Rangkaian penempatan tersebut, menurut Damai, menjadi bahan untuk menelaah bagaimana hubungan antartokoh dan kesinambungan jaringan politik terbentuk dalam pemerintahan saat ini.

Namun, pengaruh politik seorang mantan presiden dan hubungan personal antar pejabat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kendali langsung terhadap keputusan pemerintahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Pasukan Gibran: Jika Pemakzulan Terjadi, Keduanya Turun Bersamaan

Oleh Redaksi · 3 Okt, 20.39 WIB



BANDA ACEH - Gugatan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) terus memunculkan perdebatan mengenai konsekuensi ketatanegaraan jika perkara tersebut berujung pada pemakzulan.

Advokat sekaligus Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia (PAGI) Fritz Alor Boy menilai posisi presiden dan wakil presiden tidak dapat dipisahkan begitu saja.

Menurut Fritz, presiden dan wakil presiden dipilih rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Karena itu, ia menilai konsekuensi Politik dan ketatanegaraan dari pemakzulan tidak semestinya hanya dilihat dari posisi Gibran sebagai wakil presiden.

"Presiden dan wakil presiden satu paket. Jika pemakzulan terjadi, keduanya turun bersamaan. Bukan satu hanya Gibran, tapi jatuhnya pemerintahan," tulis Fritz dalam unggahan di akun Threads, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Fritz di tengah persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang masih bergulir di MK. Perkara itu berkaitan dengan gugatan terhadap syarat pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Fritz diketahui merupakan pendukung Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Ia juga mengaku pernah memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran dalam Pilpres 2024.

Dengan latar belakang tersebut, Fritz menyayangkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang menurut penilaiannya belum menunjukkan sikap terbuka terhadap persoalan hukum yang sedang dihadapi wakil presidennya.

Ia bahkan mengajak para pendukung Prabowo untuk tidak melihat gugatan terhadap Gibran sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

"Pendukung Prabowo jangan senang Gibran diganggu di MK. Ayo kita bersatu melawan Denny Indrayana," ujar Fritz.

Adapun perkara yang kini bergulir di MK berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Para pemohon meminta Mahkamah menyatakan diskualifikasi cawapres Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sesuai Pasal 169 huruf r UU Pemilu dan membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

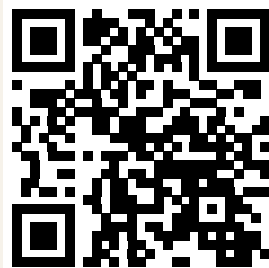
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Sebelum Diangkat Jadi Kepala Bakom, Syahganda Nainggolan Bilang Gibran Harus Selesai di Dua Tahun Ini

Oleh Redaksi · 3 Okt, 16.56 WIB



BANDA ACEH - Gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, bisa menjadi pintu untuk membicarakan kembali arah Politik Indonesia.

Sebelum diangkat sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI pada Jumat (2/10), ia bahkan sempat melontarkan pernyataan keras mengenai keberadaan Gibran dalam kepemimpinan nasional.

Syahganda menilai persoalan Gibran bukan sekadar perkara hukum. Menurutnya, isu tersebut juga berkaitan dengan moral dan etika kehidupan berbangsa.

"Gibran ini simbol daripada kerusakan bangsa dari segi moral dan etika, maka Gibran ini memang harus selesai di dua tahun ini," kata Syahganda saat hadir

sebagai narasumber dalam kanal YouTube Bambang Widjojanto yang tayang 25 September 2026.

Pernyataan itu disampaikan ketika Syahganda membahas gugatan yang diajukan Profesor Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Perselelisan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Para pemohon mem-persoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Syahganda mengatakan momen tersebut semestinya tidak hanya dilihat dari proses hukum yang sedang berjalan. Ia berharap persoalan tersebut dapat menjadi bahan refleksi untuk membangun kehidupan politik yang lebih mengedepankan pertumbuhan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Ia kemudian mengaitkan persoalan itu dengan proses kaderisasi dan pengalaman kepemimpinan. Syahganda membandingkan Gibran dengan sejumlah wakil presiden sebelumnya, termasuk Adam Malik, B.J. Habibie, Jusuf Kalla, dan Boediono.

"Gibran ini memang tidak pantas jadi wapres. Kita pernah punya wapres namanya Adam Malik, PBB semua orang tepuk tangan ketika dia berpidato. Lalu kita punya wapres Habibie yang bisa membuat pesawat terbang, kita punya wapres Yusuf Kalla, kita punya wapres Boediono," ujarnya.

Menurut Syahganda, perbandingan tersebut menunjukkan pentingnya pengalaman sebelum seseorang berada di tingkat kepemimpinan nasional. Ia kemudian melontarkan kritik terhadap perja-

lanan Gibran menuju posisi wakil presiden.

"Tiba-tiba bocil muncul. Dia ngerusak sistem saraf kita sebagai orang-orang normal di bangsa ini. Nggak ada kompetensinya," sambungnya.

"Harusnya ini orang jadi camat dulu. Jadi wali kota pun nggak pantas," lanjut dia.

Di tengah kritiknya, Syahganda menegaskan bahwa pandangannya tidak dimaksudkan sebagai persoalan kebencian personal terhadap Gibran. Ia mengatakan kritik tersebut berkaitan dengan gagasannya mengenai penataan kembali politik Indonesia.

"Bukan saya membenci orang sebagai masukan personal. Indonesia harus disusun ulang berdasarkan landasan moral politik," imbuh Syahganda.

NASIONAL

Komisi III DPR ke Kapolri Suyudi Ario Seto: Hapus Budaya 'No Viral No Justice'!

Oleh Redaksi · 3 Okt, 17.07 WIB



BANDA ACEH - Komisi III DPR RI menaruh sejumlah harapan besar kepada Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Mulai dari mendesak penghapusan budaya 'no viral no justice' di tubuh Polri, hingga memastikan agar anggotanya tidak lagi bersikap represif terhadap masyarakat kecil.

"Tentunya kami menyampaikan selamat kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas amanah barunya sebagai Kapolri. Tugas Jenderal Suyudi ke depan cukup berat, yakni mengembalikan marwah Polri sebagai pelayan masyarakat," ujar Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 3 Oktober 2026

Benny juga berpesan agar Jenderal Suyudi mampu mengembalikan Polri sebagai lembaga penegak hukum yang independen, bukan sekadar alat kekuasaan.

"Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Polri adalah alat negara, bukan alat pemerintah atau penguasa. Melihat dinamika

beberapa tahun belakangan ini, tugas utama Jenderal Suyudi adalah memastikan Polri kembali bekerja sesuai fungsi dan tugasnya," tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

Selain itu, Benny menilai Jenderal Suyudi perlu segera melakukan reformasi kultural di tubuh kepolisian—terutama mengubah kebiasaan penanganan perkara yang baru akan cepat diproses apabila kasus tersebut viral di media sosial terlebih dahulu.

"Harus ada reformasi kultural Polri, dari arogansi menuju pelayanan. Kasus Sambo, Kanjuruhan, hingga penganiayaan warga masih membekas di ingatan publik. Harapan kami, Kapolri baru harus berani menghapus kultur 'no viral no justice' serta menerapkan zero tolerance terhadap pungli, pemerasan, dan aksi backing," harapnya.

"Kami juga berharap Jenderal Suyudi dapat mempercepat pembentukan peradilan pidana yang independen bagi anggota Polri, tidak hanya berhenti pada sidang etik saja," tutup Benny.

NASIONAL

Rocky Gerung Kena Sentil: Tak Perlu Kutip Istilah Filosofis Jika Ingin Ikut Nikmati Kekuasaan

Oleh Redaksi · 3 Okt, 20.55 WIB



BANDA ACEH - Rocky Gerung kini telah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) turut menuai sorotan dari sejumlah kalangan akademisi maupun pengamat.

Salah satunya datang dari Pengamat Politik Adi Prayitno. Meski tak menyebut nama, sang pengamat diduga menyindir Rocky yang kini bergabung kedalam pemerintahan Prabowo.

Padahal, Rocky selama ini dikenal sebagai kritikus tajam terhadap pemerintah, namun kini justru berbalik dan bergabung dengan pemerintah saat ini.

"Kekuasaan itu tak pernah bercerita. Tak perlu dimusuhi. Ia datang begitu saja. Tapi bisa merusak iman Politik semua orang," kata Adi Prayitno dalam akun Instagram pribadinya dikutip pada Sabtu (3/10/2026).

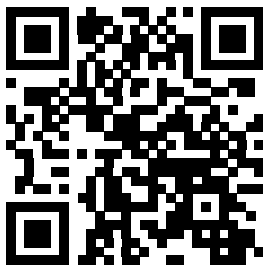
Adi kemudian meminta Rocky untuk tak perlu mengutip istilah-istilah filosofis jika ingin menikmati kekuasaan.

"Dan tak perlu mengutip istilah-istilah filosofis jika hanya sekedar ingin ikut menikmati kekuasaan. Fenomena akhir zaman memang begitu," ucapnya menambahkan.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

KBRI Tak Temukan Dokumen Akademik Gibran, Gibranisti Beri Tanggapan Begini

Oleh Redaksi · 3 Okt, 20.42 WIB



Foto: KompasTV/PRASETYO

Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfaqih. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfaqih, menanggapi adanya pernyataan atase pendidikan yang menyebut tidak menemukan dokumen apa pun terkait pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura maupun Canberra, Australia.

Taufik justru balik mempertanyakan kewajiban seseorang untuk memberi salinan dokumen akademik ke pihak KBRI.

"Memangnya seluruh pelajar dari luar negeri wajib memberikan salinan dokumen akademiknya kepada KBRI? Itu juga jadi pertanyaan. Tidak ada satu mekanisme, tidak ada satu aturan yang mewajibkan itu," ujarnya dalam dialog

Kompas Petang KompasTV, Sabtu (3/10/2026).

Taufik meminta agar tidak ada pihak yang membingkai informasi tersebut menjadi pembenaran bahwa eks Wali Kota Solo itu tidak pernah sekolah.

"Jangan di-framing seolah-olah hanya karena kebetulan dari KBRI menyatakan tidak ada data, seolah-olah itu membenarkan Gibran tidak pernah sekolah. Itu lucu juga," ucapnya.

Tidak hanya itu, Taufik menilai upaya mempertanyakan pendidikan Gibran kepada pihak KBRI tidak relevan.

Terutama berkaitan dengan sistem pendidikan yang ada di UTS Inserach dan Orchid Park Secondary School sebagaimana riwayat pendidikan Gibran.

Taufik kemudian menegaskan Gibran lulus dan mendapatkan Advanced Diploma dari Management Development Institute of Singapore (MDIS) di Singapura.

Keterangan Atase Pendidikan di Sidang Gugatan Ijazah Gibran

Atase Pendidikan KBRI Singapura, Nur Aeni Ariyanti, mengaku tidak menemukan dokumen apa pun terkait pendidikan Gibran Rakabuming di KBRI Singapura.

Hal itu disampaikan dalam sidang gugatan ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat (2/10/2026).

"Ibu bisa menambahkan enggak record-record apa yang dimiliki di kedutaan berkaitan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh

Pak Gibran itu?" tanya Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang tersebut.

Nur mengaku dirinya telah menelusurinya, tetapi tidak menemukan dokumen apa pun.

"Setelah kami menelusuri dokumen yang ada, di kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI, Yang Mulia," tuturnya.

Hal senada disampaikan Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati. Menurutnya, pihaknya tidak memiliki dokumen terkait pengajuan permohonan dari Gibran.

"Berdasarkan penelusuran arsip baik secara hard copy maupun soft copy, kami tidak memiliki pengajuan permohonan dari Pak Gibran," ujar Yuli dalam sidang.

NASIONAL

Denny Siregar Dukung Rocky Gerung: Mending Dia di Dalam daripada Istana Dikuasai Orangnya Jokowi

Oleh Redaksi · 3 Okt, 20.59 WIB



BANDA ACEH - Pegiat media sosial yang juga dikenal sebagai produser film, Denny Siregar, ikut menanggapi kabar masuknya akademisi Rocky Gerung ke dalam Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui tanggapannya, Denny membeberkan pandangannya mengenai sosok Rocky Gerung dari kacamata seorang produser film.

Menurutnya, Rocky adalah figur yang terbilang unik dan independen.

"Dari kacamata produser, Rocky ini adalah karakter yang unik. Cara berpikirnya bebas dan liberal, susah diatur karena semau dirinya saja. Dia tidak suka uang karena buat dia bukan itu tujuannya, dan pergaulannya luas," ujar

Denny, dikutip fajar.co.id dari akun media sosialnya, Sabtu (3/10/2026).

Denny mengakui, dirinya dahulu termasuk pihak yang berseberangan dan kerap mengkritik tajam analisis Politik Rocky Gerung.

Namun, ia tak memungkiri bahwa kritik Rocky terhadap arah kepemimpinan negara terbukti beralasan.

Ia juga menceritakan momen berkesan saat berhadapan langsung dengan Pengamat Politik tersebut.

"Satu yang harus diakui, Rocky pernah mengingatkan kita bahwa ada yang tidak beres dalam kepemimpinan negara ini. Dia melawan arus dan digebuki dari mana-mana, termasuk saya. Satu waktu pas ketemuan, dia bilang, 'Udah selesai Den dungunya?' Sialan," kenang Denny.

NASIONAL

Jalan Panjang Brigjen Tubagus Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Oleh Redaksi · 3 Okt, 17.10 WIB



BANDA ACEH - Pucuk pimpinan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri berganti.

Brigjen Tubagus Ami Prindani yang merupakan salah satu perwira tinggi Polri dan memiliki rekam jejak panjang di Densus 88 ditunjuk menggantikan Irjen Sentot Prasetyo sebagai Kepala Densus 88 sesuai Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Brigjen Ami yang merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akp) 1997 rupanya menghabiskan sebagian besar kariernya di satuan yang fokus menangani tindak pidana terorisme tersebut.

Selain itu, Brigjen Ami juga pernah bekerja di satuan kerja reserse, intelijen, kewilayahan, maupun staf.

Saat berpangkat Komisaris Besar (Kombes), Brigjen Ami sudah bertugas sebagai Kasubsat-

gas Lidik II Densus 88 lalu naik menjadi Kasatgaswil DKI Jakarta Densus 88.

Setelah itu, Brigjen Ami ditunjuk menjadi Ps Direktur Pencegahan Densus 88. Karirnya semakin menanjak saat ditunjuk menjadi Direktur Pencegahan (Dirceguh) Densus 88.

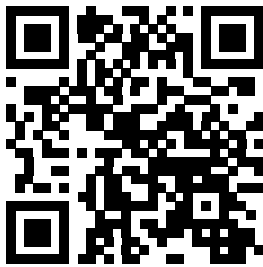
Saat mengampu jabatan ini, Brigjen Ami ditantang untuk menjalankan fungsi penindakan terhadap jaringan terorisme dengan cara mendeteksi dini potensi radikalisme terhadap calon taruna dan taruni di Akademi Kepolisian (Akp).

Kiprah Brigjen Ami saat menjadi Dirceguh menuai apresiasi, dan dipercaya sebagai Direktur Intelijen Densus 88 Antiteror Polri. Tak berselang lama, pada Mei 2026, Brigjen Ami ditunjuk sebagai Wakil Kepala Densus 88 Antiteror Polri.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Gatot Nurmantyo: Jika MK Kabulkan Gugatan, Saat Itulah Prabowo Jadi “The Real President”

Oleh Redaksi · 3 Okt, 12.47 WIB



BANDA ACEH - Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo menilai terdapat dua kemungkinan skenario terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Skenario pertama adalah apabila MK menolak gugatan yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama para pemohon lainnya. Dalam pandangan Gatot, kondisi tersebut berpotensi menguntungkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Gatot, penolakan gugatan itu dapat membuat Jokowi menilai bahwa pengaruh politiknya masih kuat di berbagai lembaga negara. Situasi tersebut, menurutnya, bisa dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Politik Gibran pada masa mendatang.

"Kalau Gibran ditolak, berarti Jokowi masih punya kekuatan. Jadi enggak berefek. Bolehlah ganti, bawahnya masih orang saya. Masih punya keyakinan seperti itu tentunya kan," ujar Gatot dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Jumat (2/10).

Gatot menilai, apabila skenario tersebut terjadi, Jokowi bisa saja melihatnya sebagai momentum yang menunjukkan bahwa pengaruhnya masih bertahan di berbagai lini kekuasaan.

"Kalau ini terjadi maka saya enggak tahu. Karena logika berpikir saya, pasti momentum akan dimanfaatkan oleh Jokowi. Saya masih kuat, iya kan. Di tingkat yudikatif masih saya kuasai, ya kan. Eksekutif sebagian orang-orang saya juga masih di sana. Ddi legislatif juga masih saya, masih di bawah tanah kan masih. Kalau

ini terjadi maka momentum ini akan dimanfaatkan. Kalau bisa cepat dong Gibran jadi presiden. Logika berpikirnya seperti," imbuhnya.

Sementara itu, skenario kedua adalah apabila MK justru mengabulkan gugatan tersebut. Menurut Gatot, kondisi itu akan memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto benar-benar memegang kendali penuh atas pemerintahannya sendiri.

"Tapi kalau sebaliknya, nah kalau sebaliknya inilah merupakan benar-benar the real President Prabowo," tandasnya.

Sebagai informasi, Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya menggugat keabsahan syarat pendidikan Gibran ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mendalilkan adanya persoalan administratif dan dugaan manipulasi terkait peme-

nuhan syarat ijazah minimal tingkat SLTA atau sederajat milik Gibran.

Berdasarkan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat pendidikan paling rendah untuk calon presiden dan calon wakil presiden adalah tamat SMA/SLTA atau sederajat. Menurut Denny Indrayana, ditemukan indikasi awal bahwa syarat formal pendidikan tersebut tidak terpenuhi secara sah sejak awal proses pendaftaran di KPU.

Salah satu tuntutan para pemohon dalam gugatan tersebut adalah meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan.

NASIONAL

Denny Indrayana Minta MK Kabulkan Gugatan, Klaim Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA

Oleh Redaksi · 3 Okt, 17.14 WIB



BANDA ACEH - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dia berharap hakim konstitusi mengabulkan petitem yang meminta Gibran didiskualifikasi.

"Insya Allah harapannya dari kami permohonannya dikabulkan, Gibran bisa didiskualifikasi," ujar Denny Indrayana yang juga menjadi pemohon perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Sabtu (3/10/2026).

Denny menilai permohonan tersebut perlu dikabulkan karena, menurut klaimnya, persidangan PHPU telah membuktikan Gibran tidak memiliki ijazah pendidikan SMA.

Dia juga mengeklaim persidangan menunjukkan Pasal 18 ayat

(3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan aturan yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi putra Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

"Ini tentu saja pelanggaran konstitusi yang serius, sehingga MK semestinya menegakkan prinsip pemilihan jujur dan adil dengan mendiskualifikasi Gibran," lanjut Denny.

Dia berharap putusan MK dapat menjadi solusi atas persoalan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Menurutnya, apa pun putusan yang dijatuhkan harus dihormati dan ditaati semua pihak.

"Tentu putusan MK yang mestinya solutif menjadi solusi persoalan kebangsaan kita, mesti ditaati oleh semua pihak apapun putusannya mudah-mudahan memang sesuai dengan prinsip jujur dan adil kepemiluan kita," tutur dia.

NASIONAL

Guntur Romli Curiga Dirjen Gogot Terlibat Kongkalikong Suket Gibran, Desak MK dan Ombudsman Periksa

Oleh Redaksi · 3 Okt, 19.23 WIB



BANDA ACEH - Politikus PDIP, Guntur Romli, melontarkan kecurigaan kepada Dirjen Gogot Suharwoto.

Ia mempertanyakan keterlibatan Gogot dalam suket penyetaraan milik Gibran.

"Apa Dirjen Gogot Suharwoto terlibat dalam kong kali kong suket Gibran? Publik pantas geram," ujar Gun Romli melalui akun Instagramnya, Sabtu (3/10/2026).

Menurutnya, Gibran tidak pernah menunjukkan sertifikat kelulusan dari UTS Insearch.

Yang ada hanya sertifikat kehadiran dan transkrip nilai yang memuat nilai gagal.

"Sejak kapan nilai gagal bisa disulap menjadi tanda tamat?" katanya.

Gun Romli juga menyoroti sikap Gogot saat tampil di sidang Mahkamah Konstitusi.

Padahal, pada 2019 Gogot belum menjadi dirjen, melainkan Kepala Pustekom Kemendikbud.

Suket Gibran disebut diurus secara daring pada 6 Agustus 2019 dan terbit di hari yang sama.

"Satu hari! Padahal aturannya minimal lima hari," tegas Gun Romli.

Ia pun mempertanyakan, apakah itu hanya kebetulan atau ada jalur khusus bagi anak presiden kala itu.

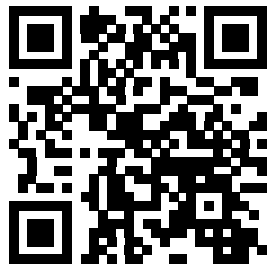
Gun Romli lantas meminta MK, Ombudsman, dan Inspektorat memeriksa Gogot.

"Jika tak ada yang disembunyikan, buka semua log sistemnya," ucapnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Apa Kehebatan Suyudi Ario Seto? Ini Dugaan Alasan Prabowo Tunjuk jadi Kapolri

Oleh Redaksi · 3 Okt, 16.13 WIB



BANDA ACEH - Penunjukan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan.

Pergantian pucuk pimpinan Polri tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai pertimbangan Presiden Prabowo Subianto memilih Suyudi untuk memimpin Korps Bhayangkara.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo kemudian mengungkap analisisnya mengenai sosok Suyudi. Dalam perbincangan di kanal YouTube Hersubeno Point, Gatot menilai latar belakang Suyudi di bidang kejahatan siber menjadi salah satu faktor penting.

Menurut Gatot, kemampuan di bidang siber memiliki arti strategis

bagi seorang pimpinan lembaga penegak hukum pada era digital. Terlebih, kepolisian memiliki unit siber yang menangani berbagai informasi dan data digital.

"Cyber kepolisian adalah salah satu unit cyber terkuat di Indonesia. Pak Suyudi memiliki latar belakang di bidang cyber, artinya beliau adalah figur yang memegang dan mengetahui data dengan sangat lengkap," ujar Gatot.

Menurut analisis Gatot, penguasaan terhadap data tersebut dapat menjadi modal penting bagi seorang pimpinan kepolisian dalam membaca situasi keamanan.

Kemampuan memahami informasi digital juga dinilainya berkaitan dengan kecepatan dalam merespons berbagai persoalan.

Selain latar belakang siber, Gatot menyoroti posisi Suyudi

sebagai perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akp) 1994.

Pergantian dari pimpinan yang lebih senior kepada perwira dari angkatan yang lebih muda, menurutnya, dapat memberikan ruang bagi proses regenerasi di tubuh Polri.

Dengan jenjang karier dan sisa masa dinas yang masih memadai, Gatot menilai Suyudi memiliki waktu untuk melakukan konsolidasi sekaligus pembenahan internal.

Pergantian pucuk pimpinan tersebut juga dikaitkan dengan harapan terhadap perubahan karakter kepolisian.

Gatot melihat kepemimpinan baru dapat menjadi momentum untuk kembali menegaskan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Harapan lainnya adalah berkurangnya persepsi mengenai keterlibatan kepolisian dalam Politik praktis.

Dengan demikian, tantangan bagi Suyudi bukan hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dipimpinnya.

Di tengah pergantian mendadak tersebut, latar belakang siber dan penguasaan data menjadi salah satu aspek yang disoroti Gatot dalam membaca alasan di balik penunjukan Suyudi.

Kini, Suyudi dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan konsolidasi internal sekaligus menjawab ekspektasi terhadap arah baru kepemimpinan Polri.

NASIONAL

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Oleh Redaksi · 3 Okt, 05.46 WIB



BANDA ACEH -Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra buka suara soal mundurnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi.

Mashudi mundur sebagai buntut dari kontroversi temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibirong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Saya sungguh menghormati keputusan Pak Mashudi meletakkan jabatan akibat kontroversi temuan fasilitas mewah di Lapas Cibirong. Itu menunjukkan beliau mempunyai integritas moral dan tanggung jawab atas apa yang terjadi," kata Yusril kepada wartawan Jumat, 2 Oktober 2026.

Lanjut Yusril, sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi memang memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan.

"Tanggung jawab etik mendahului tanggung jawab hukum. Karena itu, sekali lagi, saya menaruh rasa hormat kepada keputusan beliau meletakkan jabatan," ujar Yusril.

Kendati demikian, Yusril menegaskan bahwa pertanggungjawaban etik tidak menghilangkan atau melepaskan seseorang dari kemungkinan pertanggungjawaban hukum.

"Sekiranya aparat penegak hukum melakukan investigasi atas temuan Ombudsman, Pak Mashudi, sekalipun telah meletakkan jabatan sebagai pertanggungjawaban moral, sama sekali

tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum," tegasnya.

Dengan adanya peristiwa ini, Yusril mengatakan dirinya berharap Mashudi tidak terlibat dalam persoalan hukum yang terjadi di Lapas Cibirong.

"Sebagai Menko, tentu saya berharap beliau tidak terlibat apa-apa atas yang terjadi di Lapas Cibirong," kata Yusril.

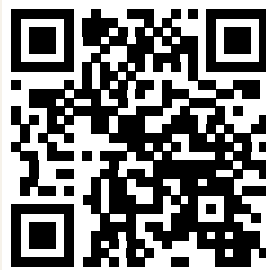
Sebagaimana diketahui, Mashudi mengundurkan diri dari jabatannya setelah temuan Ombudsman mengenai fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibirong menjadi perhatian publik.

Pengunduran diri Mashudi diterima oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

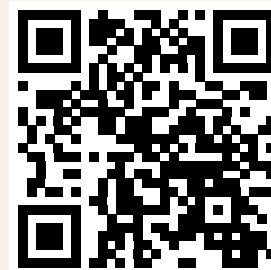
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Mahfud MD: Hakim MK Bisa Diskualifikasi Gibran Kalau Berani

Oleh Redaksi · 3 Okt, 12.19 WIB



BANDA ACEH - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD menyoroti dinamika perkembangan gugatan ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan perkembangan dalam sidang MK, Mahfud MD menilai bahwa kasus ini bisa dipidana.

Namun ketika ini sudah lewat dan baru ketahuan sekarang, sementara dulu belum terkuak.

“Ini bukan hanya penemuan hukumnya. Kalau penemuan hukum ini sudah selesai nih, sudah lewat dan sudah diadili. Tapi ini, dulu kan tidak muncul,” ujarnya di kanal YouTube podcast Terus Terang Mahfud MD.

Menurut dia, bisa saja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dilakukan diskualifikasi atas pencalonannya.

Namun, menurutnya hal ini tidak akan diputuskan hakim.

“Kita lihat nanti MK, berani kayak apa. Menurut saya MK akan mengabulkan sedikit, tidak total, mungkin, saya tidak tahu ya,” paparnya.

Menurut dia, melihat perkembangan terbaru dalam sidang MK atas gugatan Denny Indrayana dkk, sudah cukup untuk mendiskualifikasi Gibran.

“Saya berpikir, udah segini ini bisa, bisa saja itu diskualifikasi. kalau Mknya berani,” papar dia.

“Ada beberapa alternatif, yang terpikir dia, sebenarnya nggak sulit. Saya tidak akan mempengaruhi hakim,” tegas Mahfud MD.

Sementara itu, dalam kesaksiannya, KBRI Singapura dan KBRI di Canberra Australia, mengaku tak

memiliki dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Nur Aini Ariyanti, atase Pendidikan KBRI Singapura, menjelaskan mengenai sistem pendidikan di Singapura.

Mulai dari pendidikan di anak usia 4 tahun sampai ke pendidikan tinggi di universitas.

“Setelah kami menelusuri dokumen yang ada, di kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan,” kata Nur Airni lewat daring dalam sidang MK Jumar, 2 Oktober 2026.

Kemudian hakim Saldi Isra menanyakan apakah ada dokumen pendidikan setara SLTA di KBRI Singapura milik Gibran.

“Tidak ada dokumen tersebut,” jawabnya.

Hal senada juga disampaikan

atase pendidikan di KBRI Canberra, Australia, Yuli Rahmawati.

KBRI tidak memiliki dokumen terkait pengajuan, pendidikan Gibran di Australia.

Pihaknya telah menelusuri Arsip di KBRI Canberra, baik dalam bentuk hard copy dan soft copy.

“Berdasarkan penelusuran, arsip baik secara hard coipt dan soft copy kami tidak memiliki pengajuan dari Pak Gibran terima kasih,” ujarnya via daring.

Denny Indrayana dkk sebelumnya melayangkan gugatan ke MK terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

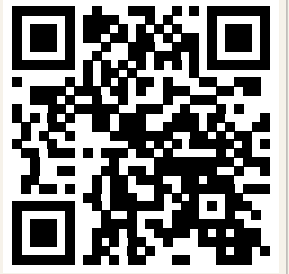
Denny menggugat KPU karena telah menetapkan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden RI.

Ia menduga Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau yang setara.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

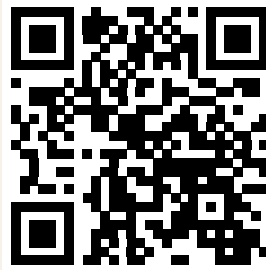
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



OPINI

4 BERITA

OPINI

Ketika MK Diuji oleh Syarat Pendidikan Gibran

Oleh Redaksi · 3 Okt, 19.35 WIB



Oleh: Kenny Wiston((Penulis adalah Advokat))

DA perkara yang selesai ketika hakim membacakan putusan.

Ada pula perkara yang jauh lebih panjang umurnya: perkara yang setelah putusan dibacakan justru meninggalkan pertanyaan bagi sejarah.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi berpotensi menjadi perkara jenis kedua.

Di permukaan, sengketa ini berbicara tentang syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi di bawah permukaan, yang sedang diuji sesungguhnya adalah sesuatu yang jauh lebih besar: apakah hukum pemilu masih mampu membedakan antara kepastian prosedural dan kebenaran substantif ketika keduanya berhadapan di persimpangan jalan?

Di sinilah MK berada. Dan di sinilah sembilan Hakim Konstitusi sedang diuji.

Bukan Lagi Sekadar Soal Ijazah

Perdebatan publik terlalu mudah terjebak pada satu pertanyaan. Ada ijazah atau tidak ada ijazah?

Padahal hukum tidak sesederhana itu. Persoalan yang jauh lebih penting adalah status hukum seorang calon pada saat pencalonan.

Jika suatu syarat diwajibkan oleh undang-undang, maka yang harus diuji bukan hanya keberadaan dokumen pada hari ini, melainkan apakah persyaratan tersebut memang telah terpenuhi ketika calon mendaftarkan diri.

Di sinilah persoalan tempus menjadi penting. Sebuah dokumen yang terbit kemudian dapat memiliki dua kemungkinan karakter.

Ia dapat sekadar mengonfirmasi fakta yang sejak awal sudah ada. Tetapi ia juga dapat dipersoalkan apabila justru menjadi dasar baru untuk menciptakan atau melengkapi status yang sebelumnya belum terpenuhi.

Perbedaannya bukan administratif belaka. Perbedaannya menyangkut keabsahan pencalonan.

Negara Hukum Tidak Boleh Hanya Pandai Menghitung Tenggat Waktu

Tentu saja, kepastian hukum penting. Pemilu membutuhkan

batas waktu. Tahapan harus memiliki ujung. Sengketa tidak boleh dibuka tanpa batas. Negara tidak mungkin terus-menerus hidup dalam ketidakpastian mengenai siapa yang sah menduduki jabatan publik.

Tetapi ada persoalan yang lebih mendasar. Apakah lewatnya tenggat waktu dapat menyembuhkan cacat yang sejak awal bersifat fundamental?

Pertanyaan ini tidak boleh dijawab secara serampangan. Jika jawabannya selalu “ya”, maka kepastian prosedural berpotensi berubah menjadi tempat berlindung bagi persoalan substantif.

Sebaliknya, jika jawabannya selalu “tidak”, maka setiap tahapan pemilu tidak pernah benar-benar final.

Di antara dua ekstrem itulah MK harus menemukan garis konstitusionalnya. Dan garis itu tidak boleh ditentukan oleh tekanan Politik. Ia harus ditemukan melalui hukum.

Presiden Sudah Memberi Petunjuk

MK bukan institusi yang sama sekali asing dengan persoalan dis-

kualifikasi calon setelah pemungutan suara.

Dalam perkara Orient Patriot Riwu Kore, Mahkamah pernah mendiskualifikasi pasangan calon terpilih karena persoalan kewarganegaraan dan memerintahkan pemungutan suara ulang.

Lebih menarik lagi, dalam perkara Pilwalkot Palopo, Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, persoalan syarat pendidikan menjadi bagian penting yang berujung pada diskualifikasi calon dan pemungutan suara ulang.

Artinya, secara yurisprudensi, syarat calon bukan wilayah yang otomatis tertutup dari pemeriksaan setelah suara diberikan rakyat.

Tetapi preseden juga tidak boleh dipakai secara mekanis. Perkara Presiden dan Wakil Presiden mempunyai dimensi konstitusional yang berbeda.

Skala akibatnya berbeda. Dan karena itu, MK harus menjelaskan dengan sangat terang: mengapa preseden tertentu relevan, sekaligus mengapa perbedaan ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

OPINI

Dari Pratikno hingga Rocky Gerung: Membaca Makna Wantimpres Prabowo Menuju 2029

Oleh Redaksi · 3 Okt, 17.02 WIB



Oleh: Satrio Arismunandar((Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA.))

DA sesuatu yang menarik dari susunan baru Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026.

Bukan hanya karena jumlahnya mencapai 26 orang. Bukan pula semata karena di dalamnya terdapat mantan menteri, jenderal, pengusaha besar, ulama, tokoh organisasi keagamaan, akademisi, ahli hukum tata negara, mantan hakim Mahkamah Konstitusi, aktivis, hingga tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah.

Yang menarik adalah pesan Politik dan kelembagaan yang dapat dibaca dari keragaman itu. Prabowo tampaknya tidak sedang membangun satu “kabinet kedua”. Ia sedang membangun sebuah ruang konsultasi yang jauh lebih lebar: ruang tempat pengalaman kekuasaan, pengalaman bisnis, pengetahuan agama, pengalaman keamanan, pemikiran hukum, jaringan masyarakat sipil dan bahkan suara kritik dapat ditempatkan dalam satu meja.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar: siapa saja mereka? Pertanyaan yang lebih penting adalah: untuk apa Prabowo membutuhkan mereka pada tiga tahun terakhir pemerintahannya menuju 2029?

Karakter Wantimpres Baru

Lihat komposisinya. Di pucuk Wantimpres terdapat Pratikno sebagai ketua, Hatta Rajasa sebagai wakil ketua dan Muhammad Qodari sebagai sekretaris. Ketiganya membawa pengalaman yang berbeda.

Pratikno adalah akademisi ilmu politik yang kemudian menjadi Rektor UGM dan Menteri Sekretaris Negara selama dua periode pemerintahan Joko Widodo, sebelum menjadi Menko PMK pada pemerintahan Prabowo. Hatta Rajasa adalah teknokrat-politikus yang pernah menjadi menteri di pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Qodari datang dari dunia riset politik, survei,

komunikasi politik dan pemerintahan Prabowo.

Susunan tiga serangkai ini sendiri sudah memberi petunjuk mengenai karakter Wantimpres baru: pengalaman birokrasi, pengalaman kebijakan ekonomi-politik dan kemampuan membaca opini serta komunikasi publik.

Menariknya lagi, Pratikno baru saja meninggalkan posisi Menko PMK dan kemudian ditempatkan sebagai ketua Wantimpres. Artinya, ia tidak datang ke lembaga ini sebagai orang yang harus belajar dari nol mengenai mesin pemerintahan Prabowo. Ia datang dari dalam pemerintahan itu sendiri.

Ini penting. Wantimpres membutuhkan orang yang memahami bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan, bagaimana ia dinegosiasikan antarkementerian, bagaimana keputusan politik diterjemahkan menjadi program dan di mana biasanya birokrasi mengalami hambatan. Pratikno memiliki pengalaman tersebut.

Bukan Sekadar “Orang Dekat”

Di sinilah istilah “afiliasi” menjadi menarik. Dalam politik, seseorang bisa memiliki afiliasi karena hubungan partai, hubungan organisasi, hubungan profesional, hubungan personal atau pengalaman bekerja bersama. Tetapi afiliasi tidak otomatis berarti ketidakprofesionalan.

Justru dalam sebuah lembaga penasihat presiden, pengalaman kedekatan dengan pusat kekuasaan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga—sekaligus potensi kelemahan apabila kedekatan itu membuat seseorang kehilangan jarak kritis.

Karena itu, ukuran penting Wantimpres bukan semata-mata apakah anggotanya dekat atau tidak dekat dengan Presiden. Ukuran yang lebih substantif adalah: apakah mereka mampu mengatakan kepada Presiden sesuatu yang mungkin tidak ingin didengarnya?

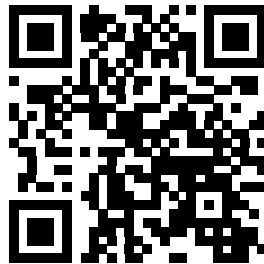
Di sinilah keberadaan Rocky Gerung menjadi menarik. Ia bukan figur yang selama ini dikenal sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan Prabowo.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

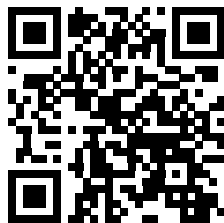
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



OPINI

Tak Ada “Grade 12” di Sekolah Gibran

Oleh Redaksi · 3 Okt, 05.50 WIB



Oleh: Ahmadi Thaha((Mantan wartawan TEMPO, pendiri HU Republika, pengasuh pesantren Manbaul Ulum Cirebon.))

ADA 6 Agustus 2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah surat keterangan tentang pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Surat yang saya lihat bernomor 7141/D2.1/KR/2019. Dokumen lain yang menjadi objek sengketa dalam perkara sekarang tercatat bernomor 9149/D.D1/KS/2019, juga bertanggal 6 Agustus 2019. Dua nomor surat ini justru perlu dijelaskan, bukan dicampuradukkan.

Pada dokumen bernomor 7141 yang saya pegang, Dr. Sutanto, S.H., M.A., menandatangani surat atas nama Direktur Jenderal. Saat itu Direktur Jenderal Dikdasmen adalah Hamid Muhammad, Ph.D., sedangkan Sutanto menjabat Sekretaris Ditjen Dikdasmen.

Surat yang mencantumkan Ir. Joko Widodo sebagai orang tua tersebut menerangkan bahwa

Gibran “telah menyelesaikan pendidikan ‘Grade 12’ di UTS Insearch, Sydney, Australia tahun 2006” dan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

Tujuh tahun kemudian, frasa “Grade 12” itu mencuat ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan perkara diajukan pada 10 September 2026 dan resmi diregistrasi MK pada 17 September 2026 dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

-000-

Pada sidang 1 Oktober 2026, Ina Liem, ahli dan konsultan pendidikan yang dihadirkan pihak terkait, memberikan keterangan tentang riwayat pendidikan Gibran di UTS Insearch. Ketika hakim menggali program yang ditempuh Gibran, Ina menegaskan, “UTS Insearch tidak punya program Grade 12.”

Di situlah perkara menjadi menarik. Sebab surat pemerintah menyebut Gibran menyelesaikan Grade 12 di UTS Insearch,

sedangkan ahli dan konsultan pendidikan yang dihadirkan pihak terkait mengatakan UTS Insearch tidak punya program Grade 12.

Refly Harun, salah satu pemohon, kemudian mengatakan seusa sidang bahwa keterangan tersebut justru memperkuat pihaknya. Tetapi kita tidak perlu mengikuti kesimpulan siapa pun. Cukup letakkan dua keterangan itu berdampingan.

Kita cukup bertanya sederhana, yaitu, “kalau UTS Insearch tidak mempunyai program Grade 12, apa yang dimaksud dengan “Grade 12 di UTS Insearch” dalam surat keterangan yang diterbitkan Dikdasmen?”

Jangan buru-buru menjawabnya. Bisa saja Grade 12 merupakan istilah yang dipakai pihak kementerian untuk menyatakan tingkat kesetaraan, bukan nama program yang ditempuh Gibran.

Namun, jika demikian, surat tersebut tetap memerlukan penjelasan mengenai program atau kredensial apa yang sebenarnya dinilai setara. Sebab nama jenjang, nama program, bukti kelulusan,

dan hasil penyetaraan bukan hal yang sama.

-000-

Keterangan Ina menjadi lebih menarik ketika ia menjelaskan program yang tersedia pada masa Gibran belajar di Insearch. Menurut penelusurannya, program bisnis yang tersedia adalah Diploma of Business, bukan Foundation Business.

Saya juga menelusuri, arsip UTS/Insearch periode 2004 memang menunjukkan adanya program Foundation Studies itu, tapi bidang yang tercantum bukan Business. Untuk bisnis, Insearch menawarkan berbagai program diploma, bukan tingkat sekolah menengah.

Perbedaannya penting. Foundation Studies merupakan program persiapan atau pathway menuju pendidikan tinggi. Sementara Diploma of Business merupakan program pendidikan tinggi yang dirancang sebagai jalur menuju program sarjana tahun berikutnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

OPINI

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Oleh Redaksi · 3 Okt, 05.54 WIB



Oleh: Rosadi Jamani((Mantan wartawan))

AMIS malam mungkin tidak banyak yang menonton live sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, pada jam sama Timnas Indonesia sedang menggilas Bangladesh 9-2 dan memastikan tiket ke final. Kasihan Malaysia dan Singapura, main mata eh malah terjungkal keduanya.

Saya ingin menginformasikan, apa yang menonjol pada sidang MK itu.

Sidang perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Kamis malam 1 Oktober 2026, memasuki babak pembuktian Termohon KPU, pihak terkait Militer Gibran 08 Nusantara, dan Bawaslu. Sehari sebelumnya giliran Denny Indrayana dkk sebagai Pemohon.

Lalu terjadilah adegan paling sinematik pada sidang MK itu. Ahli pihak terkait Muhammad Rullyandi diusir dari ruang sidang. Padahal, dari rumah sudah dandan agar terlihat gagah. Eh, malah diusir hakim. Kenapa?

Sebelumnya, Rullyandi pernah mengatakan di televisi bahwa sidang PHPU ini “ilegal” dan Ketua MK juga “ilegal”. Hakim Arsul Sani kemudian mengajukan pertanyaan yang kalau masuk film terdengar seperti dialog sutradara. “Kalau persidangan ini ilegal, mengapa Anda datang menjadi ahli?”

Hakim Saldi Isra meminta pernyataan tersebut dicabut. Setelah skors singkat, MK akhirnya hanya menerima keterangan tertulis Rullyandi dan memintanya meninggalkan ruang sidang. Ahli datang membawa argumentasi. Pulang membawa pengalaman spiritual.

Sementara itu, permintaan Pemohon agar Gibran dan Menteri Hukum dihadirkan langsung juga ditolak. MK menyatakan sudah membahasnya. Jumat 2 Oktober pukul 09.00 WIB, majelis akan menghadirkan pemberi keterangan lain.

Kemudian kamera film pindah ke benda paling misterius, dokumen pendidikan Gibran.

Pemohon mempersoalkan surat keterangan penyetaraan Kemen-

dikbud 2019 menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insearch setara lulusan SMK/SLTA. Mereka menuding ada persoalan administratif dan mempertanyakan proses penerbitannya. Kubu KPU dan pihak terkait menyatakan dokumen tersebut sah dan memenuhi syarat.

Lalu muncullah pemeran pendukung bernama Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Norma ini memberi pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon lulusan luar negeri sudah memiliki ijazah perguruan tinggi.

Pemohon mempertanyakan kenapa norma tersebut muncul menjelang Pilpres 2024. Mereka menyebut tidak muncul dalam uji publik maupun konsultasi DPR dan baru muncul pada tahap harmonisasi. Bawaslu juga disebut pernah menyampaikan keberatan melalui nota dinas.

KPU punya alur cerita sendiri. Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyatakan tidak ada niat atau motif memudahkan Gibran. Ahli KPU Agus Riwanto menjelaskan verifikasi faktual bukan kewajiban otomatis apabila dokumen administratif tidak menimbulkan keraguan atau aduan.

Ahli KPU Khairul Fahmi kemudian membawa cerita ke babak finalitas. Menurutnya, PHPU tidak dapat diajukan setelah Presiden dan Wakil Presiden dilantik. Persoalan setelah pelantikan berada dalam rezim hukum pemerintahan, termasuk mekanisme pemakzulan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Pemohon tetap ngotot. Denny Indrayana dkk kecewa Gibran tidak dihadirkan. Mereka kembali menyatakan belum menemukan dokumen menurut mereka membuktikan kelulusan SMA/ sederajat selain surat penyetaraan. Mereka juga menyinggung perkara Pesawaran dan Nias Selatan sebagai pembandingan.

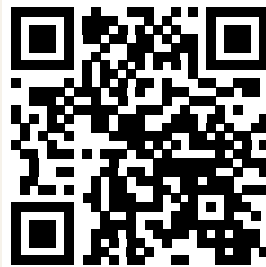
So, apakah Gibran sudah bisa didiskualifikasi? Belum bisa disimpulkan dari sidang tadi malam.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

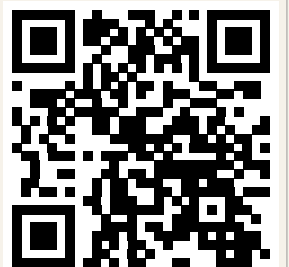
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ANEKA BERITA

7 BERITA

EKONOMI

Bagaimana Kerja Jarak Jauh Mengubah Pencarian Kerja Modern

Oleh Redaksi · 3 Okt, 21.23 WIB



Seorang wanita profesional muda yang sedang bekerja di depan laptop di sebuah ruangan modern dengan pemandangan kota yang luas. Suasana foto terasa hangat, tenang, dan produktif. FOTO/Al for HAI.

BANDA ACEH - Cara orang mencari pekerjaan telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Belum lama ini, menemukan pekerjaan baru biasanya berarti memeriksa papan lowongan lokal, mengunjungi situs web perusahaan, berbicara dengan kenalan di daerah Anda, dan berharap ada peluang yang cocok di sekitar tempat tinggal.

Hari ini, situasinya terlihat sangat berbeda. Kerja jarak jauh (remote work) telah membuka pintu bagi peluang yang mungkin berjarak ratusan atau bahkan ribuan kilometer.

Bagi para pencari kerja, perubahan ini membawa lebih banyak pilihan, namun juga meningkatkan persaingan.

Ketika lokasi bukan lagi syarat utama, perusahaan dapat menerima lamaran dari orang-orang di berbagai kota, negara, dan zona waktu. Lalu, bagaimana cara Anda agar bisa menonjol?

Memahami metode modern dalam mencari pekerjaan dapat membuat prosesnya jauh lebih mudah.

Lokasi Bukan Lagi Hambatan Terbesar

Salah satu perubahan paling signifikan yang dibawa oleh kerja jarak jauh adalah kebebasan dari batasan geografis. Seseorang yang tinggal di kota kecil kini dapat melamar pekerjaan di perusahaan yang berbasis di kota besar tanpa harus pindah tempat tinggal.

Hal ini sangat menguntungkan bagi mereka yang bekerja di bidang seperti teknologi, layanan pelanggan, pemasaran, penulisan, desain, pengembangan perangkat lunak, dan pendidikan daring.

Banyak dari peran ini dapat dilakukan hanya dengan menggunakan koneksi internet yang stabil dan keterampilan yang mumpuni.

Tentu saja, tidak semua pekerjaan jarak jauh sepenuhnya bebas dari batasan lokasi. Beberapa perusahaan masih mewajibkan karyawannya untuk tinggal di negara atau zona waktu tertentu.

Perusahaan lain mungkin sekali meminta karyawan untuk menghadiri konferensi atau acara perusahaan secara langsung (tatap muka).

Namun demikian, pasar kerja secara keseluruhan kini menjadi jauh lebih luas.

Pencarian Kerja Menjadi Lebih Digital

Kerja jarak jauh juga mengubah cara orang mencari peluang. Metode tradisional masih memiliki tempatnya, tetapi platform daring kini telah menjadi bagian utama dalam proses tersebut.

Para pencari kerja kini dapat menjelajahi halaman karier perusahaan, jaringan profesional, situs lowongan kerja khusus, dan komunitas industri.

Seseorang yang tertarik untuk melamar pekerjaan berpotensi menemukan ratusan peluang yang relevan tanpa perlu meninggalkan rumah.

Ini berarti jejak digital Anda kini lebih penting dari sebelumnya.

Profil LinkedIn, portofolio, situs web pribadi, atau akun media sosial profesional Anda terkadang bisa sama pentingnya dengan CV Anda.

Pemberi kerja ingin melihat bukti nyata dari apa yang bisa Anda kerjakan, terutama ketika mereka tidak dapat bertemu Anda secara tatap muka.

Membangun profil daring yang kuat tidak harus rumit. Pastikan informasi Anda selalu diperbarui, jelaskan pengalaman Anda dengan jelas, dan tampilkan contoh hasil kerja Anda sebisa mungkin.

Keterampilan Bisa Lebih Penting daripada Lokasi

Perekrutan jarak jauh telah mendorong banyak perusahaan untuk lebih berfokus pada keterampilan dan hasil kerja. Jika sebuah perusahaan merekrut secara remote, mereka mungkin tidak terlalu mempermasalahkan tempat tinggal Anda, melainkan lebih memperhatikan apakah Anda dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efektif.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

ACEH

Plt Sekda Taufik Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Kantor PWI Aceh

Oleh Redaksi · 3 Okt, 17.38 WIB



BANDA ACEH, Banda Aceh – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh di Kantor PWI Aceh, Sabtu (3/10/2026).

Kehadiran Taufik menjadi bagian dari silaturahmi Pemerintah Aceh bersama insan pers dalam momentum peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan organisasi kewartawanan di Aceh.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diisi dengan tausiah dan doa bersama.

Taufik menyampaikan bahwa momentum Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat nilai-nilai keteladanan, persaudaraan, dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, Ketua PWI Aceh bersama jajaran pengurus dan anggota turut mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Peringatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan.***

OTOMOTIF

Rumor Mobil Dinas Seskab Teddy Ringsek di Bogor, Istana Belum Bersuara

Oleh Redaksi · 3 Okt, 12.28 WIB



BANDA ACEH - Video mobil rusak berat yang beredar di media sosial sejak sekitar 28 September 2026 memicu spekulasi bahwa kendaraan itu milik Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Hingga Sabtu (3/10/2026), klaim tersebut belum dikonfirmasi kepolisian, Sekretariat Kabinet, maupun media arus utama.

Rekaman yang viral memperlihatkan sebuah SUV hitam dalam kondisi ringsek di kawasan yang disebut warganet berada di sekitar Bogor atau Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hambalang dikenal sebagai lokasi kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto. Dugaan keterkaitan dengan Seskab muncul karena kemiripan model kendaraan dan lokasi, bukan dari pernyataan resmi.

Tidak ada keterangan bahwa Teddy Indra Wijaya berada di dalam mobil, mengalami cedera, atau bahwa mobil dinasny terlibat. Sejumlah unggahan hanya menyebut harapan agar semua pihak selamat, tanpa memastikan identitas kendaraan maupun korban.

Teddy Indra Wijaya, perwira TNI berpangkat letnan kolonel, menjabat Seskab sejak 21 Oktober 2024. Ia kerap mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja, termasuk penanganan bencana di Sumatera, dan belakangan tampil menjelaskan sejumlah kebijakan pemerintah.

Reaksi warganet

Spekulasi itu memancing komentar beragam di platform X. Sebagian bernada spekulatif, sebagian lain bersifat keras.

Akun @DavinHaseum menulis, “KATA KATA APA YG AKAN KAMU SAMPAIKAN KALAU TEDDY BENERAN MATI DARI KECELAKAAN BOGOR.”

Akun @svntnad mengunggah foto disertai dugaan, “Apakah buna teddy udah tau duluan jd dia galau mau nyamper ke hambalang eh kecelakaan. Wild teory.”

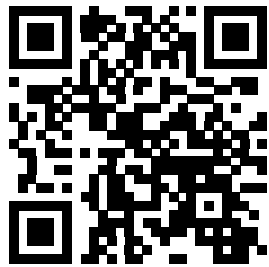
Akun @RvclwG berkomentar, “Eh alhamdulillah kalo si Teddy yang tewas, kalo supirnya gimana anjirr? Gak jadi kecewa dong.”

Komentar-komentar itu tidak disertai bukti baru dan tetap berada di ranah opini media sosial.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



HIBURAN

Siapa Bilqis Luvena alias Miss Cendut? Selebgram Banyuwangi yang Videonya 27 Detik Viral

Oleh Redaksi · 3 Okt, 16.10 WIB



BANDA ACEH - Jagat media sosial belakangan ini mendadak heboh gara-gara nama selebgram asal Banyuwangi, Bilqis Luvena Danendra alias Miss Cendut, jadi perbincangan panas.

Sayangnya, kepopuleran video parodi berdurasi 27 detik milik sang content creator justru dimanfaatkan oknum nakal untuk menyebarkan narasi hoaks yang sangat merugikan.

Pihak keluarga bersama tim kuasa hukum Miss Cendut tak tinggal diam dan langsung mengambil tindakan tegas lewat jalur hukum demi membersihkan nama baiknya. Fenomena ini menjadi pengingat keras bagi para netizen agar tak gampang tertipu judul clickbait yang menyesatkan tanpa mencari tahu fakta sebenarnya.

Siapa Sih Sosok Miss Cendut?

Sosok Bilqis Luvena Danendra sejatinya bukanlah pemain baru di dunia hiburan digital karena dirinya sudah rajin memproduksi konten kreatif sejak tahun 2022.

Kepiawaiannya mengocok perut audiens berhasil memikat ratusan ribu followers setia, baik di platform TikTok maupun Instagram pribadi miliknya.

Basis penggemar yang tergolong jumbo inilah yang membuat setiap unggahan video pendeknya selalu sukses menduduki deretan trending topic dalam waktu singkat.

Tak heran jika setiap gerakan atau audio mashup yang disengkol oleh sang selebgram langsung berpotensi besar menjadi viral secara instan.

Bedah Fakta Video 27 Detik

Video berdurasi 27 detik yang asli dan terkonfirmasi murni dibuat oleh Bilqis hanyalah sebuah konten hiburan lipsync dengan gaya yang penuh ekspresi.

Dalam klip seru tersebut, sang selebgram tampak luwes menirukan dialog karakter Bella dari serial Tiba-Tiba Brondong yang memang sedang hits.

Aksi parodi yang terbilang sangat kreatif ini sayangnya malah digoreng secara liar oleh pihak

tidak bertanggung jawab hingga memicu rumor tak sedap.

Padahal, jika disimak secara teliti tanpa emosi, video singkat tersebut sama sekali tidak mengandung konten negatif seperti yang sering dinarasikan.

Mengapa Nama Bilqis Begitu Meledak?

Lonjakan angka pencarian nama Miss Cendut di berbagai mesin pencari terjadi akibat efek domionya gabungan antara basis pengikut besar serta penggunaan tren audio populer.

Algoritma media sosial dengan cepat merekomendasikan video ekspresif tersebut ke jutaan pengguna lain yang akhirnya memancing rasa penasaran publik secara masif.

Sayangnya, kepopuleran instan ini ibarat pisau bermata dua karena nama sang selebgram langsung dicari bersamaan dengan kata kunci lain yang makin membingungkan.

Dampaknya, opini publik langsung liar terpecah antara mereka

yang menikmati konten hiburan-nya atau justru termakan rumor absurd.

Gercep Amankan Jalur Hukum

Melihat namanya dikaitkan secara asal-asalan dengan materi bermuatan kejahatan siber, tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Harsa & Partners langsung bertindak sangat tegas.

Mereka resmi melayangkan somasi terbuka sekaligus melaporkan dugaan pencemaran nama baik ini ke pihak kepolisian di Banyuwangi.

Langkah hukum yang tergolong amat gercep ini diambil untuk memberi efek jera kepada oknum penyebar kabar bohong agar berhenti merusak reputasi sang kreator.

Kini, fokus utama kasus tersebut sudah sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas para pelaku utamanya.

Hati-Hati Jebakan Link Palsu

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

SPORT

Ari Nanda Ditunjuk Jadi Wakil Presiden Persiraja

Oleh Redaksi · 3 Okt, 19.44 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Presiden Persiraja Banda Aceh, H. Nazaruddin Dek Gam, resmi menunjuk Ari Nanda sebagai Wakil Presiden (Wapres) Persiraja menggantikan Iswahyudi (Yudi).

Penunjukan tersebut ditetapkan setelah Persiraja mengalami kekalahan pada laga pekan keempat Pegadaian Championship 2026/27, Sabtu (3/10) malam.

Keputusan ini menjadi bagian dari langkah manajemen Persiraja melakukan pembenahan internal tim setelah hasil kurang maksimal pada awal kompetisi.

Nazaruddin Dek Gam mengatakan, penunjukan Ari Nanda diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi di dalam tubuh Persiraja, baik secara internal maupun dengan pihak eksternal.

“Saya menunjuk Ari Nanda sebagai Wakil Presiden karena kami membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, baik di internal maupun dengan pihak eksternal. Saya berharap Ari bisa menjalankan tugas ini dengan baik dan membantu Persiraja menghadapi situasi ke depan,” ungkapnya, Sabtu (3/10).

Sebagai Wakil Presiden, Ari Nanda diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara manaje-

men, tim pelatih, pemain, serta berbagai pihak yang berkaitan dengan perjalanan Persiraja di kompetisi Championship musim 2026/27.

Peran tersebut dinilai penting bagi Persiraja yang tengah melakukan evaluasi dan pembenahan setelah melewati empat pertandingan awal kompetisi. Hingga pekan keempat, Persiraja belum mampu mengamankan poin dan masih berupaya bangkit untuk memperbaiki posisi di Grup Barat Pegadaian Championship 2026/27.

Penunjukan Ari Nanda juga diharapkan membawa energi baru dalam manajemen Persiraja, terutama dalam membangun komunikasi yang lebih baik dan menjaga soliditas seluruh elemen klub.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami melakukan evaluasi dan memperbaiki apa yang masih kurang. Semua harus bekerja bersama untuk Persiraja,” ujar Dek Gam.

Dengan perubahan di jajaran manajemen tersebut, Persiraja diharapkan dapat segera melakukan konsolidasi dan memusatkan perhatian pada pertandingan berikutnya. Manajemen bersama tim pelatih dan pemain akan melakukan evaluasi untuk menghadapi lanjutan kompetisi.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

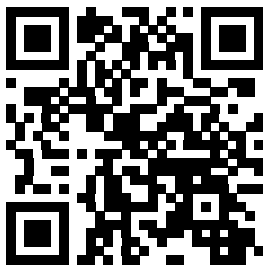
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



HIBURAN

Artis Komentari Rocky Gerung Jadi Wantimpres: Dulu Teriak Dungu Sekarang Teriak Dukung

Oleh Redaksi · 3 Okt, 12.00 WIB



BANDA ACEH - Pelantikan akademisi sekaligus aktivis Rocky Gerung menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prabowo Subianto ditanggapi sinis oleh para artis.

Sederet selebriti dan influencer mengurai respon satire menanggapi keputusan Rocky untuk masuk ke pemerintahan.

Sebab sebelumnya, Rocky dikenal berani dan keras mengkritisi tiap kebijakan pemerintahan sejak lama.

Namun di era kepemimpinan Presiden Prabowo, Rocky disebut mengubah haluan dan merapat ke kubu penguasa.

Atas keputusannya itu, Rocky pun disentil sejumlah publik figur. Siapa saja mereka?

Artis pertama yang disebut menyentil pelantikan Rocky Gerung menjadi Wantimpres itu adalah Omara Esteghlal.

Aktor kenamaan itu membuat utas di Threads pribadinya terkait

dengan sosok yang dulu lantang mengkritik tapi sekarang dilantik.

Meski tak frontal menyebutkan nama, publik ramai menduga bahwa utas Omara itu ditujukan untuk Rocky Gerung.

"Awalnya paling lantang mengkritik, ujung-ujungnya bahagia dilantik. Ku tak yakin para filsuf yang kau kutip akan bangga dengan kau," tulis Omara dilansir TribunnewsBogor.com pada Sabtu (3/10/2026).

Lebih lanjut, artis yang juga dikenal sebagai kekasih Prilly Latuconsina itu pun menyinggung slogan yang dulu pernah dipopulerkan Rocky yakni dungu.

"Dulu teriak-teriak 'dungu dungu dungu'"

Sekarang teriaknya "dukung dukung dukung"

Ini ngga sengaja atau emang lagi bingung?" tulis Omara.

Selain Omara, komika sekaligus aktor kenamaan Pandji Pragiwaksono juga disebut menyindir

Rocky Gerung usai jadi Wantimpres.

Dalam akun X (Twitter), Pandji menyebut nama Rocky dalam cuitannya.

"Judul #SILA selanjutnya: ROCKY MASUKKHHH ISTANAKKHHH. Tunggu tanggal rilisnya," pungkas Pandji.

Selanjutnya, artis yang disebut merespon satire pelantikan Rocky adalah Fiersa Besari.

Penyanyi sekaligus penulis asal Bandung itu membuat cuitan yang ramai diperbincangkan netizen di X (Twitter).

Namun Fiersa tak gamblang menuliskan siapa sosok yang disindirnya.

"Lama bungkam. Kirain disandera, ternyata dipelihara. Oalah," tulis Fiersa Besari.

Sosok terkenal yang juga disebut ikut menanggapi pelantikan Rocky adalah dr Tirta.

Dokter sekaligus influencer dan bintang iklan itu mengurai panda-

ngannya soal sosok kritikus yang kini bergabung ke pemerintahan.

Menurut Tirta, hal tersebut adalah wajar terjadi di dunia Politik.

"Dulunya kritikus sekarang gabung juga. Kaget? harusnya engga. Begitulah definisi berpolitik. Ga ada kawan ga ada lawan, semua tergantung kepentingan," tulis dr Tirta.

"Oleh karenanya, jangan mengkultuskan seseorang. Selalu sisakan ruang kritis," sambungnya.

Lantaran hal itu, Tirta meminta kepada khalayak agar jangan berekspektasi lebih tentang idola.

"Bisa jadi influencer idolamu kelak nanti juga akan jadi pejabat. Semua kemungkinan itu terbuka. So, kritis dan teruslah belajar. Life long learner," kata dr Tirta.

"Dokter kok bahas politik? lho s2 kedua saya nanti saya kan soal public health," sambungnya.

SPORT

Marc Marquez Menang Sprint MotoGP Jepang, Jorge Martin Turun ke Posisi Ketiga

Oleh Redaksi · 3 Okt, 13.43 WIB



MOTEGI — Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) tampil dominan dan memenangi Tissot Sprint MotoGP Jepang di Sirkuit Motegi. Kemenangan tersebut memangkas jaraknya dengan Jorge Martin (Aprilia Racing) dalam perebutan gelar juara dunia. Marquez kini memangkas selisih poin dari 12 menjadi tujuh poin setelah finis terdepan dalam Sprint Motegi. Sementara Martin yang menjadi pesaing utama sekaligus pemuncak klasemen harus puas berada di posisi ketiga setelah terkena hukuman turun satu posisi.

Martin mendapat penalti karena menyentuh area hijau saat keluar dari Tikungan 10 pada lap terakhir. Hukuman tersebut membuat rookie Diogo Moreira (Honda LCR) naik ke posisi kedua.

Marquez langsung tampil agresif sejak awal balapan. Begitu lampu start padam, pembalap bernomor 93 itu memacu motornya untuk melewati Martin.

Hanya dalam tiga tikungan, Marquez berhasil mengambil alih posisi terdepan.

Drama kemudian terjadi di Tikungan 3 yang melibatkan Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), dan Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing).

Alex Marquez mencoba menyalip Di Giannantonio dari sisi dalam Tikungan 3. Namun, manu-

ver tersebut justru mengenai bagian belakang motor Acosta. Keduanya terjatuh dan menyeret Di Giannantonio yang tidak sempat menghindar.

Insiden tersebut membuat ketiga pembalap tersingkir dari balapan. Setelah itu, persaingan di barisan depan mengerucut antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan rekan setim Martin, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).

Namun, Bezzecchi justru mengalami kesulitan menjaga kecepatannya. Pembalap Italia tersebut kehilangan posisi setelah disalip Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3).

Bezzecchi berusaha merebut kembali posisinya. Namun, upayanya tidak membuahkan hasil setelah ia kembali dilewati Diogo Moreira dan pembalap tuan rumah, Ai Ogura (Honda LCR), secara beruntun pada Lap 5.

Bezzecchi kemudian memilih bertahan sambil kehilangan peluang untuk bersaing di depan. Sementara itu, Marc Marquez terus mempertahankan kecepatannya dalam duel dengan Martin hingga akhirnya mengamankan kemenangan Sprint MotoGP Jepang.

Hasil tersebut membuat persaingan perebutan gelar juara dunia semakin ketat, dengan Marquez memangkas jarak poin dari Martin menjadi tujuh angka.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia